

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Krisis ekonomi global terjadi di tahun 2007-2008, salah satu lembaga keuangan terbesar di dunia bangkrut yaitu Lehman Brother. Di Negara berkembang seperti halnya Indonesia juga mengalami krisis ekonomi global ini, Bahkan di Indonesia tercatat mengalami inflasi hingga 12,14 % (dalam bi.go.id). Keadaan dunia perbankan saat itu juga mengakibatkan krisis perbankan terparah dalam sejarah perbankan nasional dan dalam seminar restrukturisasi perbankan yang menyebabkan menurunnya kinerja perbankan yaitu Meningkatnya kredit bermasalah, Dampak Likuiditas Bank November 1997, Turunnya permodalan bank, Banyak bank yang tidak mampu melunasi kewajibannya karena nilai rupiah yang terus menurun, **“Manajemen Bank yang tidak profesional”**. Menurut jurnal World Bank 1998 mengatakan bahwa salah satu faktor penentu parahnya krisis yang terjadi di Asia Tenggara adalah lemahnya implementasi sistem tata kelola perusahaan atau yang biasa disebut *“Corporate Governance”*. Seperti halnya kasus salah satu perusahaan energi terbesar di dunia (Enron) dengan perusahaan jasa akuntansi sebagai auditornya Arthur Anderson yang melakukan manipulasi pembukuan besar-besaran. Hal ini semakin membuktikan pentingnya peraturan yang mengatur tentang penerapan GCG.

Salah satu investor di Singapura melakukan penelitian tentang penerapan GCG (www.fcgi.com,2002) tercatat bahwa Indonesia berada di urutan Negara

yang kurang memperhatikan GCG dan berada di urutan paling buruk bersama dengan China. Hal ini ditunjukkan dengan lemahnya standar akuntansi dan regulasi, pertanggungjawaban, transparansi perusahaan. Dalam beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa penerapan GCG di Indonesia berada peringkat 10 terendah di Asia Tenggara dikarena masih berada dibawah rata rata CLSA (Credit Lyonnais Securities Asia). Pada tahun 1999 Pemerintah Indonesia telah membentuk Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG), Setelah krisis 2008 maka mulai digalakkan dan di benahi lagi peraturannya.

Penelitian Tabalujan dan Simon (2003) juga mengungkapkan bahwa penerapan GCG di Indonesia masih buruk dilihat dominasi kepemilikan saham perusahaan satu keluarga banyak terdapat pada perusahaan yang terdaftar di BEJ. Hal ini melanggar prinsip kesamaan antar pemegang saham. Disamping itu budaya sistem hukum di Indonesia masih jauh dari kata baik karena rendahnya pentingnya perlindungan terhadap Shareholder dan Stakeholder ini membuat pelaksanaan *corporate governance* kurang baik.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2014) upaya pengawasan terhadap perusahaan pada sektor keuangan ini dapat diwujudkan dengan adanya implementasi praktik tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG) . Dengan pengawasan GCG yang diterapkan pada perusahaan diharapkan diperbaiki dan ditingkatkan agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan baik secara finansial maupun operasional. Perusahaan yang melaksanakan GCG akan memberikan dampak yang positif bagi perusahaan salah satunya akan dapat meningkatkan kesejahteraan pemilik atau pemegang saham melalui menaikkan

nilai perusahaan di mata investor, bahkan menurut Mc Kinsley bahkan investor bersedia membayar premium antara 18% hingga 27%. GCG juga dapat mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah menurut Forum *Corporate Governance in Indonesia* (FCGI). GCG juga mendorong semua faktor internal dan eksternal dalam perusahaan agar lebih baik dalam menjalankan manajemennya. GCG juga kunci sukses perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dan tetap bertahan dan bertumbuh.

Salah satu latar belakang yang ada dalam GCG adalah “Agency Theory” hal ini muncul ketika pemilik perusahaan memberikan wewenang kepada “*professional managers*” dan memiliki beda kepentingan. Munculnya dilema ini disebabkan dari pemilik yang ingin perusahaan terus berkembang dan bertumbuh melalui ekspansi atau berupaya agar perusahaan tetap terus bertahan. Disisi lain manajer ingin perusahaan mendapatkan profit yang sebesar besarnya sedangkan manajer memiliki informasi perusahaan yang “mungkin” tidak dimiliki pemilik. Hal ini banyak memberi dampak kurang baik bagi perusahaan salah satunya menghilangkan kepercayaan investor dan dapat berpengaruh ke kinerja perusahaan. Contoh yang telah terjadi adalah dalam dunia perbankan adalah kasus Bank Bali Indonesia tahun 1997 hal yang terjadi adalah manajer Bank Bali Indonesia mendanai sebuah partai politik tertentu dengan mengalihkan dana Investasi.

Pembangunan sektor keuangan, terutama perubahan susunan atau struktur perbankan di Indonesia sangat diharapkan dapat membawa perubahan yang positif bagi perekonomian nasional, karena lembaga keuangan, khususnya perbankan

memiliki peran yang sangat penting terhadap pergerakan roda perekonomian Indonesia. Ketika negara sedang melakukan proses pemulihan ekonomi, umumnya bank masih belum bisa optimal dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan internasional yang menggambarkan rasio perbandingan jumlah kredit yang diberikan pada pihak ketiga (LDR/ Loan to Deposit Ratio). Peranan intermediasi lembaga perbankan sangat berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian suatu negara. Ketika terjadi penurunan jumlah kredit yang disalurkan akibat sikap kehati-hatian dari pihak bank, secara tidak langsung akan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi di negara yang bersangkutan.

Terdapat beberapa tugas pokok lembaga perbankan. Pertama, bank bertugas menyalurkan kredit kepada lembaga usaha atau perseorangan yang membutuhkan. Tujuan penyaluran kredit ini adalah untuk kegiatan yang bersifat produktif. Kredit sendiri terbagi menjadi tiga jenis, yaitu kredit jangka panjang, kredit jangka menengah, dan kredit jangka pendek. Kedua, perbankan memiliki tugas untuk menarik uang dari masyarakat. Artinya, masyarakat boleh menyimpan uang mereka dalam bentuk deposito berjangka, giro, atau rekening koran, serta tabanas. Ketiga, menyalurkan jasa di bidang lalu lintas peredaran dan pembayaran uang. Jasa-jasa ini termasuk jasa pengeluaran cek, menjual dan membeli wesel, penukaran valas, dan masih banyak lainnya. Keempat, bank bertugas memberikan jaminan-jaminan bank dan juga menyewakan tempat untuk penyimpanan barang-barang berharga. Sementara itu, terdapat dua jenis peranan perbankan, yaitu peranan dalam negeri dan peranan luar negeri. Peranan dalam negeri artinya adalah bank mempunyai peranan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonomi

dalam negeri seperti kegiatan administrasi keuangan, penampungan uang, penggunaan uang, penukaran dan perdagangan uang, pengawasan uang, perkreditan, dan pengiriman uang, sedang peranan perbankan untuk luar negeri meliputi hal-hal yang berkaitan dengan lalu lintas devisa, hubungan perdagangan, dan hubungan moneter antar negara.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Dalam penilaian untuk menentukan tingkat kesehatan suatu bank digunakan berbagai alat ukur penilaian kinerja bank. Menurut Standar Bank Indonesia dalam (Mulyono : 2002) analisis CAMELS terdiri atas 6 aspek yaitu capital, asset quality, management, earnings, Liquidity, Sensitivity yang merupakan salah satu alat ukur yang utama yang digunakan untuk menentukan kondisi tingkat kesehatan suatu bank. Aspek-aspek tersebut menggunakan rasio keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa rasio keuangan dapat digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank. Rasio keuangan CAMELS menggambarkan suatu hubungan atau perbandingan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dengan analisis rasio dapat diperoleh gambaran baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu bank. Penilaian dalam analisa rasio keuangan CAMELS tersebut meliputi aspek Capital yaitu untuk memastikan kecukupan modal dan cadangan guna mengantisipasi resiko yang mungkin timbul, aspek Asset untuk memastikan kualitas aset yang dimiliki bank dan nilai real dari aset tersebut, aspek Management untuk memastikan kualitas penerapan manajemen bank terutama manajemen resiko, aspek Earning untuk memastikan efisiensi dan kualitas pendapatan bank. Dan aspek Liquidity

yang digunakan untuk memastikan dilaksanakannya manajemen aset dan kewajiban dalam menentukan dan menyediakan likuiditas yang cukup serta mengurangi resiko tingkat bunga. Sensitivitas Terhadap Risiko Pasar (Sensitivity To Market Risk) Penilaian terhadap faktor sensitivitas terhadap risiko pasar.

Dengan kata lain, bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter. Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan. Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, bank harus mempunyai modal yang cukup, menjaga kualitas asetnya dengan baik, dikelola dengan baik dan dioperasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian, menghasilkan keuntungan yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta memelihara likuiditasnya sehingga dapat memenuhi kewajibannya setiap saat. Selain itu, suatu bank harus senantiasa memenuhi berbagai ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan, yang pada dasarnya berupa berbagai ketentuan yang mengacu pada prinsip-prinsip kehati-hatian di bidang perbankan. Prinsip ini dapat dikatakan Good corporate governance jadi apabila aturan ini ditaati maka kinerja bank juga akan membaik dan dapat pula dikatakan sehat.

Mengingat semakin pentingnya penerapan Good Corporate Governance dilakukanlah Kebijakan Reformasi Perbankan pada maret 1999 dengan melakukan penutupan Bank, pengambilalihan 7 bank, rekapitulasi 9 bank.

Sehingga bank yang tersisa sebanyak 151 bank. Selain melaksanakan reformasi dikeluarkanlah API (Arsitektur Perbankan Indonesia) didalamnya terdapat 6 pilar utama dan salah satunya adalah menciptakan corporate governance untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional pada tahun 2007. Hal yang menjadi salah satu pemicu maraknya lagi GCG di Indonesia salah satunya setelah munculnya kasus Bank Century dan ini menunjukkan bahwa betapa penting dan dibutuhkannya penerapan Corporate Governance yang baik.

Kondisi Perbankan di Indonesia terus mengalami perbaikan dapat dilihat di data menurut bank Indonesia tercatat pada tahun 2012 inflasi tertinggi berada di 8,38% berbeda ketika tahun 2008 inflasi mencapai 12,305%. Sedangkan pada tahun 2012-2015 inflasi terendah berada di tahun Januari 2012 mencapai 3,65% terus mengalami fluktuasi tetapi tidak melebihi ketika inflasi di tahun 2015. Likuiditas perbankan kembali menunjukkan perbaikan selama empat bulan berturut-turut yang terlihat dari penurunan LDR sistem perbankan hingga mencapai 89,5% pada Oktober 2014. Iklim suku bunga yang tinggi membawa pengaruh positif bagi pertumbuhan simpanan perbankan. Di sisi lain, melemahnya prospek bisnis menyebabkan pertumbuhan kredit mengalami perlambatan. Bank Indonesia (BI) pada 15 Januari 2015 mempertahankan bunga acuan BI rate di 7,75%. Kebijakan ini dinilai masih konsisten dengan upaya untuk mengarahkan inflasi ke targetnya di 4%-1%. Pada kenyataan hingga bulan april 2016 posisi Bi Rate mampu turun dan mencapai 6,75% di bulan maret 2016 (bi.go.id). Membaiknya sektor perbankan dengan implementasi GCG di Indonesia dapat

sejajar dengan implementasi GCG di Negara Asean dalam menyambut Masyarakat Ekonomi Asean tahun 2015.

Untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik bagi perbankan maka dibutuhkan sistem mekanisme cara kerja tersistem. Mekanisme Tata Kelola Perusahaan adalah sebuah aturan main, prosedur dan hubungan yang harus jelas antara semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan dengan baik yang melakukan control/pengawasan terhadap keputusan tersebut (Walsd dan Seward,1990 dalam Arifin 2005). Pengawasan tata kelola tersebut dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu *Internal* dan *Eksternal Mechanism*. *Internal Mechanism*, mengendalikan perusahaan dengan struktur dan proses internal seperti rapat *shareholder*, komposisi dewan direksi, dewan komisaris. *External mechanism*, pengendalian melalui perusahaan dan mekanisme pasar. Penelitian ini mengukur tata kelola perusahaan melalui mekanisme tata kelola perusahaan seperti mekanisme internal melalui variabel ukuran dewan komisaris, komisaris independen, jumlah direksi sedangkan mekanisme eksternal melalui rasio kecukupan modal (CAR)

Menurut surat edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia kepada semua bank umum konvensional di Indonesia tahun 2013 mengatakan bahwa sehubungan kewajiban bank untuk menilai sendiri tingkat kesehatan bank baik individual maupun konsolidasi mencakup pula *Good Corporate Governance* dan bank wajib untuk menyampaikan laporan pelaksanaan GCG dan bagi bank yang memiliki *homepage* wajib menginformasikannya. Kinerja perbankan selalu berakitan dengan tingkat kesehatan perbankan. Metode tingkat kesehatan

perbankan ini dikenal sebagai CAMEL ini berisi aspek permodalan, kualitas asset, rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas yang sudah ditetapkan standar ketentuannya dalam Bank Indonesia. Dalam hal ini Bank Sentral mengeluarkan regulator bahwa yang mempengaruhi kinerja perbankan terutama dalam probabilitas melalui persyaratan cadangan dan atau Rasio Kecukupan Modal (CAR). Penilaian kinerja bank memang hal yang penting, bank yang menjaga kinerjanya akan mampu membagi dividennya maka akan menaikkan nilai saham sehingga hal ini dapat berarti naiknya kepercayaan masyarakat terhadap bank bersangkutan. Kondisi tinggi atau rendahnya ROA mengindikasikan seberapa besar efisiensi penggunaan modal dan turun naiknya pendapatan.

Menurut penelitian yang dilakukan Sukamulja, 2004 menggunakan variabel dependennya adalah ROA dan Tobin's Q yang diproksikan dengan variabel independen ukuran perusahaan dan ukuran dewan komisaris. Hasil dari penelitian ini adalah kedua variabel tersebut (ukuran perusahaan dan ukuran dewan komisaris) adalah berpengaruh terhadap ROA.

Sedangkan menurut penelitian Irmalasari (2010) yang menggunakan variabel dependennya ROA dan diproxikan dengan variabel independen ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, jumlah direksi, komisaris Independen, kepemilikan asing, pemegang saham pengendali, kepemilikan pemerintah, CAR, Auditor eksternal. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa yang berpengaruh dengan ROA hanya ukuran dewan direksi, CAR, auditor eksternal sedangkan variabel ukuran perusahaan dan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap ROA. Ukuran perusahaan menggambarkan kemungkinan mencapai skala

ekonomis disisi perbankan, ukuran perusahaan dapat menggambarkan kekuatan pasar bank bersangkutan (Oktapiyani,2009). Bank yang memiliki ukuran yang besar biasanya memiliki masalah keagenan yang cukup besar pula karena sulit untuk dimonitoring sehingga harus menambah dewan komisari karena membutuhkan pengawasan yang lebih.

Dalam penelitian Klapper dan Love tahun 2002 menggunakan ROA sebagai variabel dependen dan variabel independen nya pengukuran CGI, ukuran perusahaan, dan rata rata pertumbuhan penjualan. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa ketiga variabel independen (Pengukuran CGI, Ukuran perusahaan, Rata rata pertumbuhan penjualan) berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Penelitian yang dilakukan oleh Christiawan (2015) dengan menggunakan variabel dependennya ROA dan independennya ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dan keputusan manajerial. Hasil dari penelitian ini adalah komisaris independen dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA tetapi variabel dewan komisaris dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap ROA.

Tabel 1.1
Research Gap

No	Peneliti (tahun)	Pengaruh Good Corporate Governance			Ukuran Perusahaan
		Jumlah Direksi	Ukuran dewan komisaris	Komisaris Independen	
1	Klapper dan Love (2002)				Berpengaruh
2	Hexana Sri Lastanti (2004)		Tidak Berpengaruh		
3	Sukamulja (2004)		Berpengaruh		Berpengaruh
4	Wulandari (2006)	Tidak Berpengaruh		Tidak Berpengaruh	
5	Irmalasari (2010)	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
6	Christiawan (2015)		Tidak Berpengaruh	Berpengaruh	Berpengaruh

Sumber : jurnal penelitian terdahulu

Berdasarkan *research gap* tersebut terlihat bahwa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan adanya inkonsistensi hasil dimana pengaruh antar variabel bebas terhadap kinerja keuangan Perbankan. Sehingga hal ini membuat diperlukan adanya pengujian untuk menganalisis pengaruh Jumlah direksi, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, terhadap *Return On Assets* sebagai alat ukur kinerja keuangan dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Menurut Mayur dan Saravanan, 2008 dalam Oktapiyani, 2009 *Size* dapat menggambarkan kekuatan pasar dari bank yang bersangkutan. Bank yang besar akan memiliki masalah keagenan yang besar pula sehingga perlu dilakukan pengawasan dengan menambah dewan komisaris, komisaris independen, ataupun jumlah direksi. Tetapi disisi lain perusahaan yang besar justru memiliki peraturan dan tata kelola yang terstruktur, sehingga *Size* dapat digunakan sebagai variabel kontrol antara mekanisme GCG dan kinerja keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Faiza Nur

Rohmah (2013) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Ukuran perusahaan merupakan kekuatan finansial yang dimiliki oleh sebuah perusahaan dimana semakin besar aset yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin mendapat perhatian di mata masyarakat. Besarnya aset yang dimiliki oleh perbankan dapat dilihat dari banyaknya kantor cabang, banyaknya dividen yang dibagikan kepada pemegang saham yang secara otomatis menciptakan citra dan reputasi yang baik di mata masyarakat. Dengan begitu, perusahaan akan termotivasi untuk selalu mempertahankan kinerjanya yaitu kinerja keuangannya. Hasil penelitian Raharja (2012) dan Ayu Permata (2014) justru membuktikan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, ukuran perusahaan yang besar belum tentu menghasilkan kinerja keuangan yang lebih baik. Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan, semakin kompleks pula masalah agensi yang dihadapi.

Berdasarkan uraian diatas, dan juga berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang bervariasi, sulit untuk mengetahui berapa besar kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perbankan. Hal ini menarik untuk menguji konsistensi hasil penelitian sebelumnya dan memperoleh bukti empiris ada tidaknya pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Semakin membaiknya sektor perbankan di picu pula dengan munculnya surat edaran Bank Indonesia tahun 2013 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* dapat di asumsikan bahwa penerapan GCG dalam di sektor perbankan juga akan semakin baik, dan dapat disetarakan dengan GCG

dalam ASEAN sehingga akan mendukung dalam pelaksanaan program pemerintah Masyarakat Ekonomi Asean 2015 maka, peneliti memilih periode penelitian 2012-2015 untuk melihat apakah perusahaan khususnya perbankan semakin siap dalam menghadapi MEA 2015. Dengan demikian pada penelitian ini, peneliti mengambil judul **“PENGARUH MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2012-2015”** dengan menggunakan variabel kontrol ukuran perusahaan (*size*).

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka dapat diketahui bahwa pentingnya Penerapan *Good Corporate Governance* didalam Perusahaan Perbankan. Dengan berbagai dilema perusahaan perbankan yang telah ada salah satunya *Agency Theory* perbedaan kepentingan dalam mengelola manajemen keuangan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah Jumlah direksi berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan perbankan pada periode 2012 - 2015?
2. Apakah Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan perbankan pada periode 2012 - 2015?
3. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan perbankan pada periode 2012 - 2015?

4. Apakah Ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan perbankan pada periode 2012 - 2015?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah direksi terhadap Kinerja Keuangan perbankan pada periode 2012 - 2015
2. Untuk Mengetahui pengaruh Ukuran dewan komisaris terhadap Kinerja Keuangan perbankan pada periode 2012 - 2015
3. Untuk Mengetahui pengaruh Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan perbankan pada periode 2012 - 2015
4. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol terhadap Kinerja Keuangan perbankan pada periode 2012 – 2015

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan pada investor mengenai *Good Corporate Governance* yang timbul sehingga dengan mengetahuinya maka investor akan dapat lebih berhati-hati dalam melakukan investasi di dalam dunia perbankan.

2. Bagi Perusahaan

Disamping itu diharapkan hasil penelitian ini akan berguna bagi pengembangan ilmu dalam bidang perbankan dan manajemen keuangan

terutama dalam hal pengambilan keputusan investasi yang dilakukan oleh investor dengan melibatkan penerapan *Good Corporate Governance*.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini akan berguna bagi peneliti sebagai menambah wawasan peneliti dan untuk melatih diri untuk berpikir secara ilmiah dan analitis dan juga dapat digunakan sebagai bahan perbandingan antara teori yang didapatkan dalam perkuliahan dengan kondisi pada Perbankan secara nyata.

